

DAFTAR PUSTAKA

Buku

H.L.A. Hart, *The Concept of Law*, Clarendon Law Series, Oxford University Press, 1961.

Todung Mulya Lubis, *Korupsi dalam Negara Modern*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010).

Wahyudi, Sutrisno. *Manajemen Risiko dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, (Jakarta: Prenada Media, 2022).

M. Sofian Assaori, *Hukum Pidana Korupsi dalam Perspektif Jabatan Publik*, (Bandung: Refika Aditama, 2015).

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana, 2014).

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007).

Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana: Teori dan Praktik*, (Bandung: Alumni, 2016).

Joseph E. Stiglitz, *Globalization and Its Discontents*, (New York: W.W. Norton & Company, 2002).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004).

H. Ishaq, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk Kedua, Alfabeta Bandung.

Andi Hamzah, *Korupsi dalam Hukum Pidana Indonesia dan Upaya Pemberantasannya* (Jakarta: Rajawali Press, 2020).

Nursya, S. (2019). *Tindak pidana korupsi*. Jakarta: Universitas Jayabaya Press.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).

R. Wiyono, *Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Kedua, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016).

Agus Raharjo, *Hukum Pidana dan Korupsi di Indonesia*, (Surakarta: UMS Press, 2021).

Eddy O.S. Hiariej, *Asas dan Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2018).

Siahaan, Hotman. *Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah: Perspektif Hukum Administrasi dan Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2021.

Siregar, Rudy. *Manajemen Proyek dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2020.

Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Andi, 2018.

Suwondo, R. (2023). *Manajemen Kontrak Pemerintah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995.

Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2001.

Jurnal

Firmansyah, Dedi. "Pertanggungjawaban Hukum Pejabat dalam Pengadaan Barang dan Jasa," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 53, No. 1, 2023.

Dearma Sinaga, dkk., "Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dalam Tindak Pidana Korupsi," *USU Law Journal*, Vol. 3, No. 2, 2015.

Vita Mahardhika, "Analisis Yuridis terhadap Pertanggungjawaban Pejabat Pengadaan dalam Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Samudra Keadilan*, Vol. 16, No. 1, 2021.

Naony Fenti Istiqlallia, Indah Suryandari, dan A. Pradityo, “Tanggung Jawab Hukum Pejabat dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 9, No. 2, 2020.

Perundang-undangan

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia,
putusan.mahkamahagung.go.id

Internet

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), *Statistik Pengadaan Nasional 2023*, (Jakarta: LKPP, 2024), diakses 25 Mei 2025.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024*, (Jakarta: KPK RI, 2024), diakses 25 Mei 2025.

Indonesia Corruption Watch (ICW), *Tren Penindakan Kasus Korupsi 2023*, tersedia di: <https://antikorupsi.org>, diakses 25 Mei 2025.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Laporan Kinerja KPK Tahun 2024*, (Jakarta: KPK RI, 2025), diakses 25 Mei 2025.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Laporan Tahunan KPK 2024*, (Jakarta: KPK RI, 2025), diakses 28 Mei 2025.

Transparency International, “What is Corruption?” (2024), diakses 28 Mei 2025.

Transparency International, *Global Corruption Barometer* (2023), diakses 28 Mei 2025

Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi*, diterbitkan dalam kumpulan putusan MA tentang korupsi (Jakarta: MA RI, 2021), diakses 28 Mei 2025.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Laporan Tahunan KPK 2023*.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), *Pedoman Umum Pengadaan Melalui Penyedia*, 2025, diakses 30 Mei 2025.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), *Pedoman Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)*, Edisi 2025 , diakses 30 Mei 2025.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), *Pedoman Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*, 2022 , diakses 30 Mei 2025.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), *Strategi Nasional Pengadaan Digital*, 2023, diakses 30 Mei 2025.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), *Panduan Penggunaan e-Katalog untuk Pengguna Anggaran*, 2023 , diakses 30 Mei 2025.

LKPP, *Pedoman Operasional Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)*, 2022, diakses 2 Juni 2025.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), *Panduan Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP)*, 2022 , diakses 2 Juni 2025.

Komisi Informasi Pusat, *Pedoman Umum Transparansi Pengadaan Pemerintah Secara Digital*, 2022, diakses 2 Juni 2025.

Indonesia Corruption Watch (ICW), *Peran Keterbukaan Data dalam Mencegah Korupsi Pengadaan Barang/Jasa*, 2023, diakses 3 Juni 2025.